

DAFTAR PUSTAKA

- A`Alimatul Muflihatin. (2016). Pengaruh Opini Audit, Fungsi Pengawasan DPRD, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*.
- Achmad, A., Septiyanti, R., & Metalia, M. (2017). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–14.
- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). *Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur*.
- Alvini, Y. (2018). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011- 2016) Oleh. *JOM FEB*, 1, 1–15.
- Andriyani, E. (2018). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah / Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2013-2016). *Skripsi*.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). *THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE AND INTERGOVERNMENTAL REVENUE OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE (Case Study on Provincial Government In Indonesia In 2020)*. 8(6), 8368–8375.
- Cahyono, B. D. (2014). DI JAWA TIMUR IDENTIFICATION DEGREES OF FISCAL COMPETITION IN EAST. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 47–54.
- Dienti Laksmi Dewi. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daeah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*.
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada KabupatenKota di Provinsi Jawa Timur. : : *Jurnal Akuntansi Vol.*, 4(2), 104–117.

- Hapsari, D. W. (2020). PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018) THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE, LOCAL. *E-Prceeding of Management*, 7(2), 2743–2750.
- Kanwil, K., Perbendaharaan, D., & Banten, P. (2020). *Kajian Fisikal Regional*.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (n.d.). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. *Skripsi*.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi*, 14(1), 11–20.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. made A. (2016). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, TEMUAN DAN OPINI AUDIT BPK PADA KINERJA KEUANGAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*, 1150–1182.
- Millenia, N. A. (2022). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Nur. *Syntax Administration*, 3(6).
- Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda. (2019). *PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Ni*. 8(8), 4759–4787.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Pratama, A. B., & Mawardi, M. C. (2022). PENGARUH OPINI AUDIT BPK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019. *E-JRA*, 11(02), 25–34.

- Puspitasari, A., & Salisa, N. R. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Keresidenan Pati Tahun 2010-2016). *Accounting Global Journal*, 1(1), 30–41.
- Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 1767–1795.
- Rahmawaty, R. A. dan. (2020a). PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598.
- Rahmawaty, R. A. dan. (2020b). PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, 040501*, 1–66.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 43–53.
- Sedyaningsih, P. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012). *Jurnal Akuntansi*, 73, 1–14.
- Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH Rizqi. *E-Jurnal UNDIP*, 9, 1–15.
- Suandani, P., Putu, I. G., & Astawa, B. (2021). Pengaruh Opini Audit , Belanja Modal , Pendapatan Asli Daerah , Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Ganesha*, 728–739.
- Sumarjo, H. (2010). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAHTERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia).

Skripsi.

UU-HKPD:Redesign desentralisasi fiskal. (2022). No Title. *Artikel Ekonomi*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>

ZULFANNY GESTYAN PRADANA. (2022). DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019). *Skripsi*.

Zulkarnain, Z. (2020). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(April), 61–74.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html> diakses pada tanggal 21 Agustus 2022.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html> diakses pada Tanggal 22 Juli 2022.